

# JURNAL ALTERNATIVA

VOLUME 1, Juli-DESEMBER 2009



## Neoliberalisme:

Sebuah Perspektif dan Konsekuensi Praktisnya



# JURNAL ALTERNATIVA

VOLUME I, Juli-DESEMBER 2009

JURNAL  
**ALTERNATIFA**  
19116

~~Penanggung Jawab~~

~~Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional  
FISIP Universitas Hasanuddin~~

**Pemimpin Redaksi**

Finahliyah Hasan

**Dewan Redaksi**

Ramadhani Arumningtyas

Mukhradis Hadi Kusuma Jaya

Amsal Lande

Asriyanti Hafied

**Editor**

Syahrudin Idris

**Lay Out**

Ridwan M. Larigau

Nurman S. Manompo

**Diterbitkan oleh:**

Himpunan Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional

FISIP Universitas Hasanuddin

Student Center, FIS IV Lt. 1 FISIP UNHAS,

Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Makassar 90245

E-mail: [alternativa.hi@gmail.com](mailto:alternativa.hi@gmail.com)

**Bekerjasama:**

Penerbit Innawa

Jl. Abdullah Daeng Sirua 192 E,

Panakkukang-Makassar 90234

Telp./Fax: 0411 433775

<http://innawa.com>



## Pengantar

Reformasi yang dilakukan oleh Mikhail Gorbachev dalam sistem pemerintahan Uni Soviet pada tahun 1989 menjadi penanda kemenangan kapitalisme dalam perang ideologinya melawan komunisme. Hal tersebut kemudian terbukti dalam dua tahun berikutnya dengan dua peristiwa penting yaitu reunifikasi Jerman pada tahun 1990 dan hancurnya *kekaisaran* Uni Soviet pada tahun 1991. Dua peristiwa ini sekaligus menjadi penanda berakhirnya Perang Dingin, yang mengesahkan kemenangan kapitalisme. Reunifikasi Jerman menjadi tamparan bagi Uni Soviet karena Jerman Barat berhasil menyilaukan kemajuan fisik pembangunannya ke negara saudaranya, Jerman Timur, sehingga menjadi motivasi tersendiri untuk kembali bersatu di bawah satu payung Negara Jerman Raya. Suatu hal yang mengindikasikan bahwa Uni Soviet tidak mampu melakukan sesuatu untuk membantu rakyat Jerman Timur sebanyak yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan aliansinya terhadap Jerman Barat. Keunggulan kapitalisme kemudian semakin *legitimate* dengan hancur dan terpecah-pecahnya Uni Soviet menjadi beberapa negara. Selanjutnya adalah bahwa Negara-negara tersebut dalam Fakta yang terjadi selanjutnya adalah bahwa kemenangan kapitalisme dalam Perang Dingin semakin memudahkan propaganda neoliberalisme ke seluruh dunia. Kekalahan yang dialami oleh sosialisme mengesahkan bahwa pilihan terbaik telah berada pada diri neoliberalisme. Maka tanpa ragu, pemerintah negara-negara di seluruh dunia khususnya negara-negara miskin dan berkembang, kemudian dengan begitu mudahnya menerima begitu saja "resep-resep" neoliberalisme, bahkan

## Daftar Isi

Pengantar ~ iii

Daftar Isi ~ viii

Hegemoni Global Neoliberal dan Restorasi Ekonomi  
Pancasila di Indonesia ~ 1

*Empire* dan Runtuhnya Kedaulatan Negara-Bangsa ~ 24

Pengaruh Penerapan Otonomi Daerah Terhadap Arus  
Investasi Asing ke Indonesia ~ 30

HaKI (Hak atas Kekayaan Indonesia) ~ 52

Penegakan HAM, Kedaulatan Negara dan Intervensi  
Kemanusiaan ~ 57

Dialog Lintas Agama Sebagai Alternatif Pencegahan  
Terorisme ~ 62

Kim Il Sung Kim Il Sung (Sebuah Analisis Patron-Klien di  
Korea Utara) ~ 68

UNI EROPA Di Antara Persoalan Hankam, Rencana  
Perluasan, dan Krisis Identitas ~ 74

Minamata, Sebuah Tragedi Global ~ 80

Penulis ~ 84

# UNI EROPA

## Di Antara Persoalan Hankam, Rencana Perluasan, dan Krisis Identitas

Arief Wicaksono

Uni Eropa sebagai sebuah organisasi regional yang paling terintegrasi dan komprehensif, harus diakui, selama ini memainkan sebuah peran yang unik dalam tata hubungan internasional kontemporer.

Kita dapat melihatnya pada Pilar Pertama Uni Eropa yaitu European Community, selain berperan sebagai subyek hukum supranasional (*acquis communautaire*), dia juga adalah raksasa ekonomi yang sangat berpengaruh pada kebijakan ekonomi negara lain di dunia<sup>1</sup>. Akan tetapi, tidaklah demikian halnya di sektor politik internasionalnya. Telah banyak pengkaji Eropa yang bertanya, "Mengapa Uni Eropa tidak menggunakan pengaruh ekonominya untuk tujuan politiknya?". Kasus ini memperlihatkan pada kita bahwa, Uni Eropa, adalah sebuah kekuatan ekonomi regional yang mampu mempengaruhi kekuatan ekonomi internasional, dan akan tetapi sebagai sebuah kekuatan politik, ternyata dia tidak

---

<sup>1</sup> Burmalis Ilyas, 2006, 'Persaingan Euro-Dolar: Sebuah Pertarungan Hegemoni Ekonomi Politik Global', *Jurnal Kajian Wilayah Eropa*, Volume II No.2-2006, Kerjasama PSKWE-PPs UI dan Delegasi Komisi Eropa, Jakarta, hal. 101.

berkemampuan untuk mempengaruhi politik internasional.<sup>2</sup>

Berbagai bukti dan pengalaman empiris, memperlihatkan bahwa lemahnya pengaruh politik, ternyata dihasilkan dari besarnya masalah yang sedang dihadapi Uni Eropa dalam membangun sebuah strategi kebijakan luar negeri dan keamanan yang *genuine*. Dalam hal ini adalah *The Common Foreign and Security Policy* (CFSP).

### CFSP; Persoalan di Sektor Hankam

Sejak awal kelahirannya CFSP telah menuai kontroversi. Berbagai kritik terhadapnya telah lama mengikutinya sejarah pembentukannya. Kritik yang paling sering dilontarkan adalah ketimpangan yang disebabkan oleh berbagai kelemahan yang melekat terhadapnya. Seringkali CFSP terlihat sangat tidak konsisten, memiliki sistem pengambilan keputusan yang lambat, dan sangat tidak kapabel untuk sebuah badan pengambilan keputusan strategis.

Jika sebuah konsensus mengarahkan Uni Eropa untuk mencapai sebuah "keputusan bersama", hasilnya ternyata dapat berupa sebuah kebijakan yang efektif, disisi lain, ketika Uni Eropa sangat menginginkan sebuah kebijakan yang efektif, ternyata kebijakan itu tidak dapat dikatakan sebagai "keputusan bersama". Singkatnya, CFSP ternyata belum dapat mendukung Uni Eropa untuk tampil sebagai sebuah aktor hubungan internasional yang signifikan. Bahkan secara ekstrim dapat berpotensi merusak reputasi Uni Eropa sebagai aktor internasional.<sup>3</sup>

Untuk berbagai alasan ini, mari kita lihat apa saja kelemahan CFSP. *Pertama*, terkaitnya CFSP dengan batasan-batasan substantif yang bersinggungan dengan isu identitas nasional, dan kebijakan hankam bersama. Yang *kedua*, adalah batasan-batasan institusional yang berupa interaksi internal CFSP dengan lingkungan eksternalnya, proses pembuatan keputusan, dan masalah anggaran.

Kelemahan pertama, adalah masalah identitas nasional Uni Eropa dan kebijakan hankam bersama. Dalam pandangan kaum realis, sistem internasional berjalan berdasarkan pada kepentingan nasional berbagai negara yang anarkis. Tidak ada satupun otoritas dunia yang dapat mengontrol secara penuh, perilaku sebuah negara-bangsa.

---

<sup>2</sup> Arief Wicaksono, 1999, *Analisis Dampak Kebijakan Politik Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa Terhadap Kebijakan Politik Luar Negeri Boris Yeltsin*, Skripsi, Jurusan Politik Pemerintahan Prodi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP UNHAS, Makassar, hal. 3.

<sup>3</sup> J. Peterson and H. Sjursen (eds), 1998, *The European Union as a Global Actor in A Common Foreign And Security Policy?*, Routledge, London, hal.11.

Negara yang merdeka dan berdaulat, adalah komponen konstitusional dari sebuah sistem internasional. Realisme politik internasional sangat diwarnai oleh *suspicion*, dan kompetisi antar negara. Kaum realis sangat percaya, bahwa kekuatan militer sebuah negara, jauh lebih penting dalam mengkondisikan arena politik internasional, dari kekuatan ekonomi. Politik internasional akan sangat baik dijelaskan dan dipahami dengan menganalisis kapabilitas negara, bukannya kekuatan ekonomi.

Sedangkan kelemahan kedua dari CFSP adalah, terpisahnya secara struktural CFSP dari pilar-pilar Uni Eropa yang lain. CFSP, bukan merupakan pembagian struktur institusional, proses pengambilan keputusan, dan instrumen hukum yang ada di Uni Eropa, CFSP adalah masalah *inter-governmental* secara alamiah. Tetapi meskipun demikian, CFSP sangat berhubungan dengan berbagai komunitas negara yang ada pada Pilar Pertama Uni Eropa. Dalam Article 2 *Treaty Of The European Union* (TEU), ditekankan bahwa Uni Eropa harus membangun identitas tersendiri dalam pola interaksi internasional, khususnya dalam mengimplementasikan CFSP. Ini memberikan gambaran bahwa Uni Eropa dapat berinteraksi dan mendukung interaksi antara Komunitas Eropa sebagai Pilar Pertama, dan CFSP sebagai Pilar Kedua.

Dalam Article 17 TEU, CFSP harus dapat menjawab berbagai tantangan yang berkaitan dengan masalah pertahanan dan keamanan, dengan berupaya membentuk *frame* dari sebuah kebijakan pertahanan bersama Eropa. Selain itu, Uni Eropa diharapkan tidak berprasangka buruk (memandang negatif) terhadap karakter kebijakan hankam masing-masing negara anggotanya, dan diharapkan juga untuk menghormati kontribusi bersama para negara anggota yang hingga saat ini masih "terikat" kepada North Atlantic Treaty Organization-NATO. Ketentuan ini sangat jelas memandang bahwa kebijakan hankam adalah satu hal yang signifikan, mengingat hal ini terkait dengan *national sovereignty* masing-masing negara anggota Uni Eropa<sup>4</sup>. Lebih jauh, hal ini mensuratkan kondisi yaitu, CFSP harus lebih bersifat *compatible* dengan kebijakan hankam dengan kerangka NATO. Realitasnya, hal ini membuat banyak negara anggota diperhadapkan pada posisi memilih yang sangat sulit, dan jika mereka harus memilih, maka sebagian besar negara anggota Uni Eropa akan menempatkan kerangka hankam NATO sebagai prioritas dibandingkan CFSP.

---

<sup>4</sup> R.A. Wessel, 1999, *The European Union's Foreign and Security Policy*, Kluwer Law International, The Hague, hal.136.



Kelemahan lain adalah proses pengambilan keputusan dalam CFSP yang (seperti telah disebutkan diatas) masih bercorak inter-government, sangat kontras dengan struktur yang telah ada. Model pengambilan keputusan seperti ini berarti segala keputusan CFSP, harus diambil berdasarkan suara mayoritas yang ada di Dewan Uni Eropa, berdasarkan pada strategi bersama, atau berdasarkan aksi bersama, atau posisi bersama. Jika ada satu anggota Dewan Uni Eropa yang menyatakan "keputusan dianggap penting untuk kebijakan nasional", hal itu berarti seruan untuk menjadi oposan dari keputusan mayoritas tersebut, dan jika hal itu terjadi, keputusan *deadlock*. Sebuah catatan penting, bahwa keputusan mayoritas Dewan Uni Eropa dalam kerangka CFSP, ironisnya, tidak dapat diaplikasikan pada sebuah keputusan yang berimplikasi hankam.<sup>5</sup>

Pada sektor finansial CFSP, juga terdapat sebuah kelemahan yang mencolok, yaitu, tidak jelasnya payung hukum yang mengawal keputusan, di mana dan dari mana alokasi keuangan CFSP, dan seberapa besar yang dialokasikan, padahal dalam Article 268 TEU, dapat terlihat bahwa penganggaran untuk CFSP harus disediakan. Lagi dalam Article 28 (2) TEU, disebutkan bahwa segala pengeluaran administratif dibayar oleh anggota Komunitas Eropa, kecuali pengeluaran yang muncul akibat operasi militer dan implikasi hankam lainnya. CFSP sangat tidak memiliki pilihan untuk pendanaan, dan jika hal itu tidak dipikirkan lebih lanjut, maka Uni Eropa akan kesulitan memainkan peran globalnya.

### ***Enlargement* sebagai Cerminan Sikap Paradoks**

Sejak awal-awal pendirian Uni Eropa hingga saat ini, telah terjadi lima (5) kali perluasan, yang bermakna bukan hanya bertambah luasnya ukuran geografis dan populasinya, akan tetapi juga bertambahnya "pengaruh". Adalah *The Copenhagen Criteria 1993*, yang merupakan sekumpulan syarat dan kriteria ideal sebuah negara dapat menjadi anggota Uni Eropa atau tidak. Kriteria ini mengatur proses keanggotaan negara lain yang harus; 1) memiliki kestabilan negara untuk menjamin berjalannya demokrasi, hukum, HAM, dan rasa hormat dan perlindungan kepada minoritas. 2) memiliki sebuah sistem ekonomi pasar yang berfungsi dan relatif dapat berkompetisi dalam Pasar Tunggal Eropa. 3) memiliki seperangkat sistem administrasi yang dapat mendukung penerapan dan penegakan hukum Uni Eropa. Pada suatu ketika, dapat saja perluasan keanggotaan menjadi semakin tak

---

<sup>5</sup> Lihat Article 23 (2) Treaty of European Union.

terkendali, dan masalah ini harus dapat ditinjau kembali penerapannya dalam jangka satu dasawarsa ini. Dari masalah ini, kita jelas dapat melihat pemikiran yang paradoksial dari Uni Eropa, dimana pada saat yang bersamaan, kebijakan hankam yang sangat sensitif, dijalankan bersamaan dengan kebijakan rencana perluasan yang entah sampai kapan akan berakhir.

### Terancamnya Identitas

Politik luar negeri yang efektif haruslah bersandarkan pada perasaan yang sama terhadap satu identitas tertentu.<sup>6</sup> Identitas yang sama, akan sangat berarti bagi para aktor hubungan internasional yang terlibat dalam sebuah proses pengambilan keputusan politik luar negeri. Identitas juga sangat penting untuk mendefinisikan "kepentingan", satu-satunya hal yang menjadi tujuan setiap politik luar negeri.

Dalam kasus Uni Eropa, identitas bersama idealnya harus dapat ditetapkan dan diwujudkan dalam kerangka CFSP tentunya. Akan tetapi pada faktanya, komitmen atas pelaksanaan CFSP ternyata dianggap tidak terlalu penting, karena tidak memiliki efek-efek konstitutif, atas para aktor yang terlibat didalamnya. Setiap persoalan atau masalah, diputuskan melalui voting Dewan Uni Eropa dan yang menjadi minoritas akan terus mencoba untuk membuat upaya pemecahan masalah ini menjadi deadlock, dan ketika keputusan *deadlock*, maka semua idealisme perwujudan Uni Eropa sebagai satu kekuatan baru Eropa atas dunia akan sia-sia saja.<sup>7</sup>

### Kepustakaan

Article 23 (2) Treaty of European Union.

Hill, C. and W. Wallace.1996. *An Introduction to Actor and Action*, Routledge, London.

Ilyas, Burmalis.2006. 'Persaingan Euro-Dolar: Sebuah Pertarungan Hegemoni Ekonomi Politik Global', *Jurnal Kajian Wilayah Eropa*, Volume II No.2-2006, Kerjasama PSKWE-PPs UI dan Delegasi Komisi Eropa, Jakarta.

---

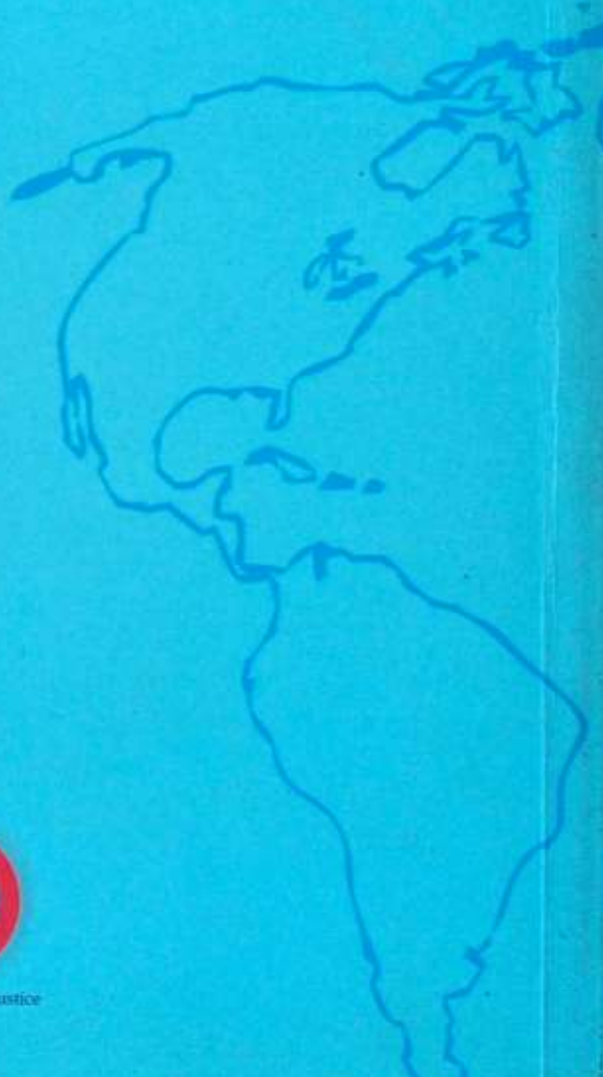
<sup>6</sup> C. Hill and W. Wallace, 1996, *An Introduction to Actor and Action*, Routledge, London, hal.8.

<sup>7</sup> Lebih jauh silakan baca, Bloom dalam *Personal Identity, National Identity, and International Relations*, 1990, dan Glynis Breakwell dan Evanthy Lyons dalam *Changing European Identities: Social Psychological Analysis Of Social Change*, 1996.

- Peterson, J. dan H. Sjursen (eds).1998. *The European Union as a Global Actor in A Common Foreign And Security Policy?*, Routledge, London.
- Wessel, R.A.1999. *The European Union's Foreign and Security Policy*, Kluwer Law International, The Hague.
- Wicaksono, Arief.1999. *Analisis Dampak Kebijakan Politik Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa Terhadap Kebijakan Politik Luar Negeri Boris Yeltsin*, Skripsi, Jurusan Politik Pemerintahan Prodi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP-UNHAS, Makassar.



JURNAL  
**ALTERNATIVA**



TERBIT ATAS KERJASAMA:

